

Pelaksanaan Bimbingan Teknis SiTB (Siap Tangguh Bencana) di Provinsi NTB

Hendy Risdianto Wijaya^{1*}, M.M. Lanny W. Pandjaitan², Lukas³, Frederick Simatupang⁴

¹Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

²Electical Engineering Master Program, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

³Cognitive Engineering Research Group (CERG), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

⁴Analisis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Adwil Direktorat MPBK, Indonesia

Article Info	Abstract
<i>Article history:</i> Received 03 May 2024 Accepted 21 May 2024 <i>Keywords:</i> SiTB, Minimum Service Standards (SPM) for Disaster Sub-Affairs, Technical Guidance, PRB Planning, NTB Province	<i>This article presents engineering practice activities in the use of the SiTB (Siap Tangguh Bencana) application to produce SPM reporting for the Disaster Sub-Affairs in NTB Province. This activity is in the form of Technical Guidance (BimTek) to the Provincial BPBD, Regency/City BPBD and related parties; which is carried out in 2 ways, namely online on June 6, 2023 via zoom and offline on June 20-22, 2023 at the Fave Hotel Langko Mataram. This activity is the result of collaboration between the Ministry of Home Affairs, Directorate General of Regional Development, the NTB Provincial Government and SIAP SIAGA. The purpose of this activity is for participants to be able to fill in data according to the instructions for filling in the SPM in SiTB and produce the 2022 SPM report. The report can be used as a document for planning financing for the Regency/City BPBD and can also be used as evaluation material for the Provincial BPBD and the NTB Regional Government in Disaster Risk Management (PRB).</i>

Info Artikel	Abstrak
<i>Histori Artikel:</i> Diterima: 03 May 2024 Disetujui: 21 May 2024 <i>Kata Kunci:</i> SiTB, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, Bimtek, Perencanaan PRB, Provinsi NTB	Artikel ini mempresentasikan kegiatan praktik keinsinyuran dalam penggunaan aplikasi SiTB (Siap Tangguh Bencana) untuk menghasilkan pelaporan SPM Sub Urusan Bencana di Provinsi NTB. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis (BimTek) kepada BPBD Provinsi, BPBD Kab/Kota dan pihak terkait; yang dilaksanakan dengan 2 cara yakni daring pada 6 Juni 2023 melalui zoom dan secara luring pada 20 sampai 22 Juni 2023 di Fave Hotel Langko Mataram. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Adwil, Pemerintah Provinsi NTB dan SIAP SIAGA. Tujuan kegiatan ini adalah peserta bisa mengisi data sesuai petunjuk pengisian SPM di SiTB dan menghasilkan laporan SPM tahun 2022. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembiayaan BPBD Kab/Kota dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPBD Provinsi dan Pemda NTB dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, salah satu upaya penting dalam penanggulangan bencana adalah pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana kepada Sekretariat Bersama (SekBer) Kementerian Dalam Negeri. Pelaporan SPM ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan tindak lanjut pelayanan kebencanaan, namun, dalam praktiknya, pelaporan SPM masih menghadapi kendala terkait dengan kelengkapan data. Data yang dikumpulkan saat ini seringkali tidak memiliki bukti dan validitas yang cukup. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) mengembangkan sebuah sistem informasi bernama SiTB (Siap Tangguh Bencana). Sistem ini merupakan inovasi teknologi yang mengumpulkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia yang digunakan untuk menghitung target capaian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Kab/Kota secara berkala. Penggunaan SiTB ini diperlukan Bimbingan Teknik (Bimtek).

Dalam kegiatan insinyur ini akan dibahas tentang Bimtek dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Adwil yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak Mei 2021 Program SIAP SIAGA (Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia) dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kerjasama dan kolaborasi untuk memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Bimtek ini mengundang perwakilan 10 BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Para perwakilan BPBD Kab/Kota inilah yang akan dilatih untuk dapat melakukan pengisian data di aplikasi SiTB.

2. METODE PELAKSANAAN

Bimtek ini adalah sebuah pelatihan yang disiapkan dari Kemendagri agar peserta bisa melakukan pengisian SiTB untuk menghasilkan capaian SPM triwulan yang dilaporkan sebanyak 4 kali. Pada setiap triwulannya akan dapat disimpulkan capaian SPM selama triwulan berjalan dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.1 Silabus Pelatihan

Tipe pelatihannya dibagi menjadi 3 jenis yakni: (i) Tipe 1 (T1): Pembelajaran 1 arah (pemberian teori); (ii) Tipe 2 (T2): Pembelajaran 2 arah (pelaksanaan sesuai petunjuk yang diberikan); (iii) Tipe 3 (T3): melakukan praktik secara mandiri (didampingi). Metode pelaksanaan Bimtek dilakukan menjadi 3 tahap yakni: 1) Seminar (online); 2) Pelatihan onsite (Offline); 3) Pengisian bersama (pendampingan). Pada Tabel 1 dapat dilihat penjabaran dari 3 tahap tersebut. Kerangka Silabus ini mengacu pada Permendagri No. 59/2021 tentang penerapan standar pelayanan minimum (SPM).

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan rincian: Tahap 1 (Seminar) dilakukan secara daring pada tanggal 6 Juni 2023 melalui zoom (berdasarkan surat undangan dari SIAP SIAGA no.060/SS/NTB/VI/2023), sedangkan Tahap 2 (Pelatihan) dan Tahap 3 (Pengisian bersama) dilakukan secara luring pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2023 di Fave Hotel Langko Mataram (berdasarkan surat undangan dari SIAP SIAGA no.089/SS/NTB/VI/2023).

2.3 Pelatih dan pendamping

Bimtek (pelatihan) ini dimulai dengan kata sambutan dari BPBD Provinsi dan dari Program SIAP SIAGA serta Fredrick Situmatupang dari Kemendagri Dirjen Bina Adwil Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK).

Pelatih yang akan melatih dari HIRC UI (Universitas Indonesia) (berdasarkan surat tugas HIRC No.ST-002/HIRC/UI/FKM/2023) adalah Dr. Hendy Risdianto Wijaya yang didampingi oleh 2 asisten pelatih (Khalfia Anisa Suad dan Fatwah Paramadhani) dan 1 orang programmer (Eko Abdul Gaffar - online) yang membantu mendampingi pada Tahap 3 (Pengisian bersama).

Peserta pelatihan dikoordinasikan oleh Program SIAP SIAGA bersama dengan BPBD Provinsi NTB. Terlihat pada Tabel 2, daftar 10 BPBD Kab/Kota di Provinsi NTB yang diundang. Total peserta yang mengikuti Bimtek (pelatihan) ini adalah sebanyak 20 orang.

Tabel 1.

Silabus Pelatihan BimTek di Provinsi NTB

Tahap 1: Seminar	
T3	Self assessment
T2	Pengisian data dasar
Tahap 2: Pelatihan	
T1	Pengertian SPM dan Penguatan Kelembagaan
T1	Pengertian menentukan prioritas bencana.
T1	Pengertian Kaji Risiko Bencana.
T2	Konsep form 5A dan pengisiannya.
T2	Konsep form 5B sd 5E dan pengisiannya.
T3	Pengisian form Monev SPM SUB
Tahap 3: Pengisian bersama (Pendampingan)	
T3	Melengkapi data yang akan diolah.
T3	Menyepakati proses perencanaan.
T3	Mengisi form Monev SPM SUB.
T3	Melaporkannya ke SiTB.

Tabel 2.

BPBD Kab/Kota yang diundang

1	BPBD Kab. Lombok Utara
2	BPBD Kab. Lombok Tengah
3	BPBD Kab. Dompu
4	BPBD Kab. Bima
5	BPBD Kab. Lombok Barat
6	BPBD Kab. Sumbawa
7	BPBD Kota Bima
8	BPBD Kab. Sumbawa Barat
9	BPBD Kab. Lombok Timur
10	BPBD Kota Mataram



Gambar 1.

Foto bersama pada hari ke-1 (20 Juni 2023)



Gambar 2.

Foto bersama pada hari ke-2 (21 Juni 2023)



Gambar 3.

Foto pembukaan (dari kiri: kalaks BPBD Provinsi NTB, Koordinator Program SIAP SIAGA NTB, Fredrick Situmorang, Hendy Risdianto Wijaya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimtek (pelatihan) ini telah berhasil mengarahkan BPBD Kab/Kota melakukan pengisian pelaporan SPM pada aplikasi Siap Tangguh Bencana (SiTB) dengan tingkat keberhasilan pengisian 82% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3. Data pengisiannya menggunakan data yang ada pada tahun 2022.

Pembahasan: Pada Tabel 3 terlihat bahwa self assessment dan data dasar dapat diisi dengan baik oleh semua peserta, namun tidak semua peserta dapat melakukan kalkulasi, perencanaan, dan realisasi. Beberapa hal penyebabnya adalah kekurangan data dan bermasalah dalam pengolahannya.

Hasil pada Tabel 3 adalah hasil yang diperoleh setelah diberikan waktu selama 1 bulan untuk melengkapi data. Hal ini dapat dianalisis bahwa kesiapan data mereka terutama untuk 4 BPBD Kab/Kota masih perlu dibantu dan dirapihkan agar menghasilkan data dari proses pengumpulan datanya.

Tabel 3.

Tingkat keberhasilan pengisian Laporan SPM para peserta BPBD Kab/Kota

No	BPBDKab/Kota	Login	Self Assessment	Data Dasar	Kalkulasi	Perencanaan	Realisasi	Keberhasilan
1	BPBD Kab. Lombok Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	BPBD Kab. Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	80%	80%	93%
3	BPBD Kab. Dompu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	BPBD Kab. Bima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	BPBD Kab. Lombok Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	BPBD Kab. Sumbawa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	BPBD Kota Bima	100%	100%	100%	0%	0%	0%	50%
8	BPBD Kab. Sumbawa Barat	100%	100%	100%	100%	0%	0%	67%
9	BPBD Kab. Lombok Timur	100%	100%	50%	80%	0%	0%	55%
10	BPBD Kota Mataram	100%	100%	100%	0%	0%	0%	50%
rata-tata keberhasilan :								82%

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Metode Bimtek (pelatihan) ini sudah berhasil dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan pengisian adalah 82%. Disamping pengisian data SiTB ini, pelatihan ini memberikan wawasan pada peserta tentang pentingnya Kaji Risiko Bencana (KRB) yang harus dimiliki sebelum membuat perencanaan. Pencatatan data di BPBD Kab/Kota perlu lebih baik lagi dari BPBD Kota Bima, BPBD Kota Mataram dan BPBD Kota Lombok Timur, BPBD Kab Sumbawa Barat yang hasil pengumpulan datanya <80%,

Berdasarkan KRB akan terlihat prioritas bencana yang akan mengarahkan pada menentukan strategi pengurangan risiko bencana (PRB). Persiapan PRB dilakukan di diperhitungkan pembiayaannya.

Penggunaan data tahun 2022 diharapkan bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi BPBD Kab/Kota untuk melihat perencanaan yang dilakukan tahun lalu sudah benar atau harus diperbaiki lagi. Hasil pengisian data dapat menjadi laporan SPM tahun 2022 dan dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk perencanaan tahun berikutnya.

4.2 Saran

Bimtek (pelatihan) ini harus dilakukan lebih rutin terhadap 514 Kab/Kota seluruh Indonesia. Pelatihan ini bukan hanya untuk mengisi data tapi juga mengajarkan prinsip dasar dari perencanaan dan realisasi sehingga bisa melakukan pengurangan risiko bencana semakin lebih baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada panitia Program SIAP SIAGA, pemerintah daerah NTB, BPBD Provinsi NTB yang telah mengundang penulis sebagai pelatih (narasumber) dalam pelatihan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Dalam Negeri. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
3. Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
4. Kementerian Dalam Negeri. (2008). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
5. Kementerian Dalam Negeri. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
6. Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Modul Instrumen Kebijakan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana*. Jakarta: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
7. BNPB. (2019). *Indeks Risiko Bencana*. Jakarta: BNPB